BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Kereta Api Indonesia

Perkembangan teknologi berjalan sangat cepat dan tidak bisa dihindari. Hal ini sejalan dengan kebutuhan manusia yang sedemikian kompleks dan penting sejalan dengan kemajuan zaman. Sarana-sarana penunjang seperti transportasi sangat dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan akan alat transpotasi bagi manusia dalam menunjang aktivitasnya sangat terasa sesuai dengan zamannya.

Sarana transportasi memberikan pelayanan jasa yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Kereta api memiliki keunggulan yang komparatif yaitu hemat lahan, hemat energi dan rendah polusi. Dengan kelebihannya ini kereta api hingga saat ini masih dibutuhkan dan di percaya oleh manusia sebagai transpotasi jasa yang aman, nyaman dan harga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat sehingga dapat bersaing dengan jasa transportasi yang lain.

PT Kereta Api (Persero) merupakan satu-satunya perusahaan jasa dalam bidang transportasi yang menggunakan kereta api sebagai sarananya yang telah lama melayani masyarakat Indonesia. Pemaparan sejarah PT Kereta Api (Persero) dimulai dari berdirinya hingga saat ini adalah sebagai berikut:

2.1.1 Zaman Kolonial Belanda (1864-1942)

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA di desa Kemijen pada tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet Va Den Beele. Pembangunan

diprakarsai oleh "*Naamloze Venootschap Nederlandische Spoorweg Maatschappij*" (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P De Bores dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 km) dengan lebar sepur 1435 mm. ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada tanggal 10 Agustus 1867.

Keberhasilan NV. NISM dalam membangun jalan KA antara Kemijen-Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang- Surakarta (110 km), akhirnya mendorong minta para investor untuk membangun jalan kereta api di daerah lainnya. Tidak mengherankan jika pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864-1900 menjadi 3338 km.

Selain di Jawa, pembangunan jalan kereta api dilakukan di Aceh (1874), Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1819), Sumatera Selatan (1914), bahkan tahun 1922 di Sulawesi juga telah dibangun jalan kereta api sepanjang 47 km antara Makassar-Talor yang pengoperasiannya mulai dilakukan pada tanggal 1 Juli 1923, sisanya di Ujung Pandang-Maros belum sempat dibangun, studi jalan kereta api Pontianak-Sambas (220 km) sudah selesai.

Demikian juga di Pulau Bali dan Lombok, juga pernah dilakukan studi pembangunan jalan kereta api. Sampai dengan tahun 1939 sepanjang jalan kereta api di Indonesia mencapai 6811 km.

2.1.2 Zaman Pendudukan Jepang (1942-1945)

Zaman pendudukan Jepang, seluruh jaringan kereta api pada pemerintahan Belanda dikuasai oleh Jepang dan diberi nama RYUKU KYOKU yang kemudian berubah nama menjadi TEDSUDO KYOKU yang berkantor pusat di Bandung.

Sedang akan perkeretaapian di Sumatera disebut TEDSUDO TAI dan berkantor pusat di Bukittinggi.

Berbeda halnya dengan zaman pemerintahan Belanda, seluruh kegiatan perkeretaapian pada zaman Jepang dimaksudkan dalam rangka mendukung usahanya memenangkan perang, di mana lintas-lintas cabang dan rel sebagian dibongkar dan dialihkan dari Indonesia untuk pemasangan lintas Thailand-Myanmar, kemudian bengkel-bengkel perkeretaapian sebagian dijadikan bengkel alat-alat perang atau militer.

Pengolahan tersebut meliputi:

a. Daerah Jawa dibawah pimpinan Angkatan Darat (Tedsudo Kyoku) dibagi kedalam 3 daerah, yaitu:

1) Bagian Barat (Sebu Kyoku),
2) Bagian Tengah (Khubu Kyoku),
3) Bagian Timur (Tobu Kyoku).

b. Masing-masing daerah tersebut dibagi kedalam beberapa daerah eksploitasi yang berdiri sendiri dan dikepalai oleh kepala inspeksi (Zimushotyo), meliputi:

1) Aceh dan SDM (Sumatera Tedsudo),
2) Sumatera Barat (Soibu Sumatera Tedsudo),
3) Sumatera Selatan (Nanbu Sumatera Tedsudo).

2.1.3 Zaman Pemerintahan Republik Indonesia (1945-Sekarang)

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, penguasaan perkeretaapian mulai beralih ke tangan pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 28 September 1945 didirikanlah Djawatan Kereta Api Indonesia

(DKAI) sebagai perusahaan kereta api pertama setelah pengalihan Indonesia. Pada masa ini banyak kesulitan dan hambatan yang mengakibatkan timbulnya kelemahan di berbagai aspek usaha.

Para pemuda kereta api yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api (AMKA) melakukan aksi pengambilalihan kekuasaan perkeretaapian di tanah air. Pada tanggal 27 September 1949 pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 yang isinya menyatakan bahwa Djawatan Kereta Api Indonesia (DKARI) dan Staat Spoorwagen (SS) digabungkan menjadi Djawatan Kereta Api (DKA). Kemudian tanggal 25 Mei 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1963 status perkeretaapian berubah dari Djawatan Kereta Api (DKA) menjadi Perusahaan Negara kereta Api (PNKA).

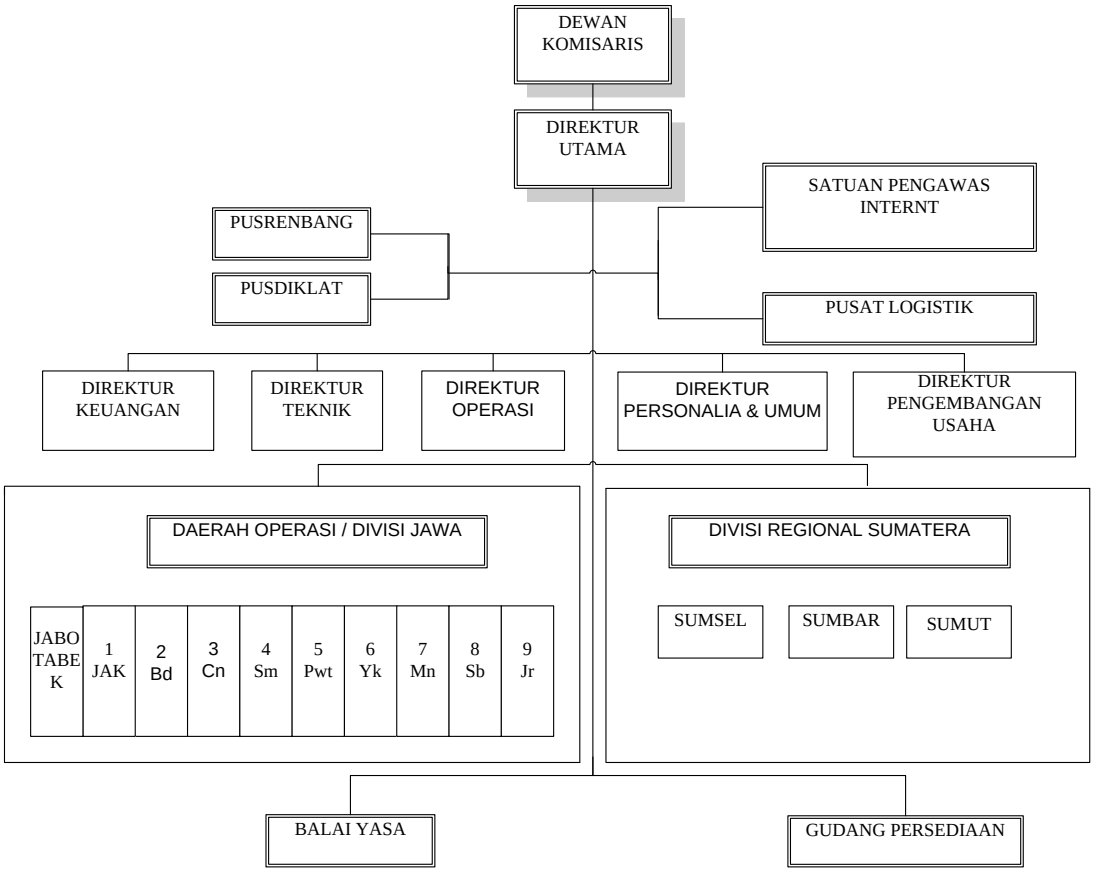
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 61, pada tanggal 15 September 1971 Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974, PJKA mengubah unit organisasi dalam lingkungan Departemen Perhubungan dimanan kedudukan, fungsi, tugas, dan susunan organisasi diatur berdasarkan Keputusan Presiden. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1991 terhitung mulai tanggal 2 Januari 1991 PJKA telah berubah status menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA), yang artinya seluruh kepemilikan dikuasai oleh negara.

Selaras dengan modernisasi perkeretaapian dalam kaitannya dengan sistem transportasi nasional dan guna menghadapi persaingan usaha, maka PERUMKA dituntut untuk mampu meningkatkan kondisi perusahaan dari semua sektor yang ada kearah yang lebih baik. Oleh karena itu PERUMKA berusaha menekan segala

kerugian yang terjadi dengan berusaha meningkatkan produktivitas kereta api dengan menggunakan peralatan secara optimal sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 terhitung sejak tanggal 1 Juni 1999 perusahaan kereta api telah dialihkan usahanya oleh pemerintah dari PERUMKA menjadi PT Kereta Api dengan bentuk Persero.

Pemerintah mengharapkan dengan perubahan status ini akan mampu meningkatkan kinerja usaha kereta api kearah yang lebih baik lagi guna menunjang pembangunan nasional, khususnya dibidang transportasi, selain itu sebagai upaya untuk mempersiapkan perusahaan untuk go public. Dengan pengalihan bentuk tersebut maka PERUMKA dinyatakan bubar pada saat pendirian perseroan tersebut, dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai PERUMKA yang pada saat pembubarannya beralih kepada perusahaan perseroan tersebut.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.2

2.3 Uraian Tugas Perusahaan

Sesuai dengan keputusan Direksi Nomor Kep. U/OT.003/XI/2/KA-2002, susunan PT Kereta Api (Persero) tingkat pusat adalah sebagai berikut:

A. Direksi

Tugas pokoknya adalah:

1. Memimpin, mengurus, dan mengelola PT Kereta Api (Persero) sesuai dengan tujuan dan tugas pokok perusahaan.
2. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perusahaan.
3. Mewakili perusahaan di dalam dan di luar peradilan.
4. Melaksanakan kebijakaan umum yang ditentukan oleh Menteri.
5. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan.

6. Menyiapkan pada waktunya Rencana Kerja Tahunan lengkap dengan anggaran PT Kereta Api (Persero).
7. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban PT Kereta Api (Persero) dan perhitungan hasil usaha menurut cara dan waktu yang telah ditetapkan Menteri.
8. Menyiapkan susunan organisasi lengkap dengan perincian tugasnya.
9. Mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi PT Kereta Api (Persero).
10. Menetapkan peraturan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan bagi pegawai serta semua hal kepegawaian lainnya.
11. Memberi segala keterangan tentang keadaan dan jalannya PT Kereta Api (Persero), baik dalam bentuk laporan tahunan maupun laporan berkala.
12. Menjalankan kewajiban-kewajiban lain berdasarkan petunjuk Menteri.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merencanakan dan pengelolan kegiatan-kegiatan PT Kereta Api (Persero) secara terpadu.
2. Pengusahaan dan pengembangan prasarana serta sarana angkutan kereta api.
3. Pengembangan dan pendayagunaan SDM.
4. Pengembangan organisasi dan manajemen PT Kereta Api (Persero).
5. Pengelolaan keuangan PT Kereta Api (Persero).
6. Pengawasan internal.

B. Direktur Utama

Tugas dan wewenangnya:

1. Pembuat dan pemberi masukan pertimbangan dan sarana untuk kebijakan teknis.
2. Bertindak untuk dan atas nama baik direksi dan semua bidang.
3. Memimpin kegiatan Direktorat.
4. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebijaksanaan direksi.

Direktorat atau bagian yang ada pada PT Kereta Api (Persero) berikut sub direktoratnya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Satuan Pengawas Intern (SPI)

Tugas bagian SPI adalah melakukan pengawasan manajemen, pengujian, penilaian atas hasil laporan serta pengusutan atas perintah Direktur Utama menyangkut bidang keuangan, bagian teknis pemeliharaan prasarana, bagian operasi dan pemasaran (pelayanan) jasa angkutan kereta api, bidang administrasi personalia, administrasi umum dan administrasi pendidikan serta pelatihan, bidang perencanaan pembangunan penelitian teknologi infomasi dan sistem informasi serta bidang kelengkapan.

2. Bagian Pusat Perencanaan dan Pengembangan (Pusrenbang)

Tugas dan wewenangnnya :

a. Perencanaan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
b. Perencanaan dan pembangunan kurikulum serta pembinaan instruktur.

3. Direktorat Teknik

Direktorat Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana yang berkaitan dengan perolehan dan pendayagunaan, pemeliharaan serta perawatan

atas sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional yang dimiliki perusahaan.

Direktorat Teknik terdiri dari:

a. Sub Direktorat Perencanaan Teknik.
b. Sub Direktorat Jalan Rel dan Jembatan.
c. Sub Direktorat Tanah dan Bangunan.
d. Sub Direktorat Sinyal, Telekomunikasi, dan Listrik.

4. Direktorat Operasi dan Pemasaran

Direktorat Operasi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknik operasi jasa angkutan kereta api serta pendayagunaan fasilitas sarana dan prasarana pendukungnya. Direksi Operasi dan Pemasaran terdiri dari:

a. Sub Direktorat Lalu Lintas.
b. Sub Direktorat Pemasaran Angkutan Penumpang.
c. Sub Direktorat Pemasaran Angkutan Barang.

5. Direktorat Keuangan

Direktorat Keuangan mempunyai tugas pokok membina dan mengelola keuangan dan sediaan, serta menetapkan kebijakan tentang pendanaan, pendayagunaan keuangan, akuntansi, dan sediaan.

Direktorat Keuangan mempunyai empat sub direktorat, yaitu:

a. Sub Direktorat Anggaran

Sub Direktorat Keuangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan menyusun program anggaran, mengkoordinasikan dan memadukan Rencana Kerja Anggaran

Perusahaan (RKAP), pelaksanaan otorisasi, pelaporan, pengendalian, pelaksanaan RAKP serta perhitungan PSO, IMO, TAC.

Sub Direktorat Anggaran terdiri dari:

1. Seksi Anggaran I.
2. Seksi Anggaran II.
3. Seksi Anggaran III.
4. Seksi Anggaran IV.

b. Sub Direktorat Administrasi Keuangan

Sub Direktorat Administrasi Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mengelola tata usaha kas besar kantor pusat, melaksanakan evaluasi pembayaran internal dan eksternal, mengendalikan dan mendistribusikan dana, serta mendayagunakaan kas perusahaan, menyelesaikan administrasi asuransi serta memantau penyaluran dana PUKK.

Sub Direktorat Administrasi Keuangan terdiri dari:

1. Seksi Bendahara Kantor Pusat.
2. Seksi Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran.
3. Seksi Pengendalian dan Pendayagunan Kas Perusahaan.
4. Seksi Asuransi dan PUKK.

c. Sub Direktorat Akuntansi

Sub Direktorat Akuntansi mempunyai tugas pokok merumuskan dan menyusun Akuntansi Umum, Akuntansi Biaya, Akuntansi Verifikasi Kas, Akuntansi Pendukung dan Perpajakan.

Sub Direktorat Akuntansi terdiri dari:

1. Seksi Akuntansi Umum (Kepala Kelompok 1/kapok 1)

Kelompok penyelenggara anggaran mempunyai tugas pokok:

1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
2) Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan Anggaran.
3) Menerbitkan Surat Otorisasi NPD (Nota Permohonan Dana).
4) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (RKA).

2. Seksi Verifikasi Kas (Kepala Kelompok II/Kapok II)

Kelompok penyelenggara verifikasi serta akuntansi pendapatan dan pengeluaran mempunyai tugas pokok:

1) Verifikasi, meneliti kelengkapan, kebenaran serta keabsahan yang berkenaan dengan pengeluaran dan pendapatan Daop 2 Bandung.
2) Akuntansi Pendapatan, Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Meneliti kelengkapan analisa dokumen lainnya yang diterima dari unit-unit pelaksana, mengikhtisarkan analisa stasiun, membuat bukti jurnal dan menyelenggarakan buku pembantu yang bersangkutan dengan pengeluaran dan pendapatan Daop 2 Bandung.

3. Seksi Akuntansi Biaya (Kepala Kelompok III/Kapok III)

Kelompok penyelenggara akuntansi biaya, persediaan, dan aktiva tetap mempunyai tugas pokok:

1) Pembiayaan dan dokumentasi lainnya yang diterima dari unit-unit pelaksana menyangkut akuntansi biaya.
2) Menyusun buku pembantu yang berkenaan dengan akuntansi biaya, persediaan dan aktiva tetap.

3) Melakukan pemantauan atas mutasi-mutasi terhadap aktiva tetap.

4. Seksi Akuntansi Pendukung (Kepala Kelompok IV/Kapok IV)

1) Proses komputerisasi akuntansi.

2) Penyelenggaraan buku besar.

3) Pembuatan daftar sisa.

4) Penyusunan neraca lajur.

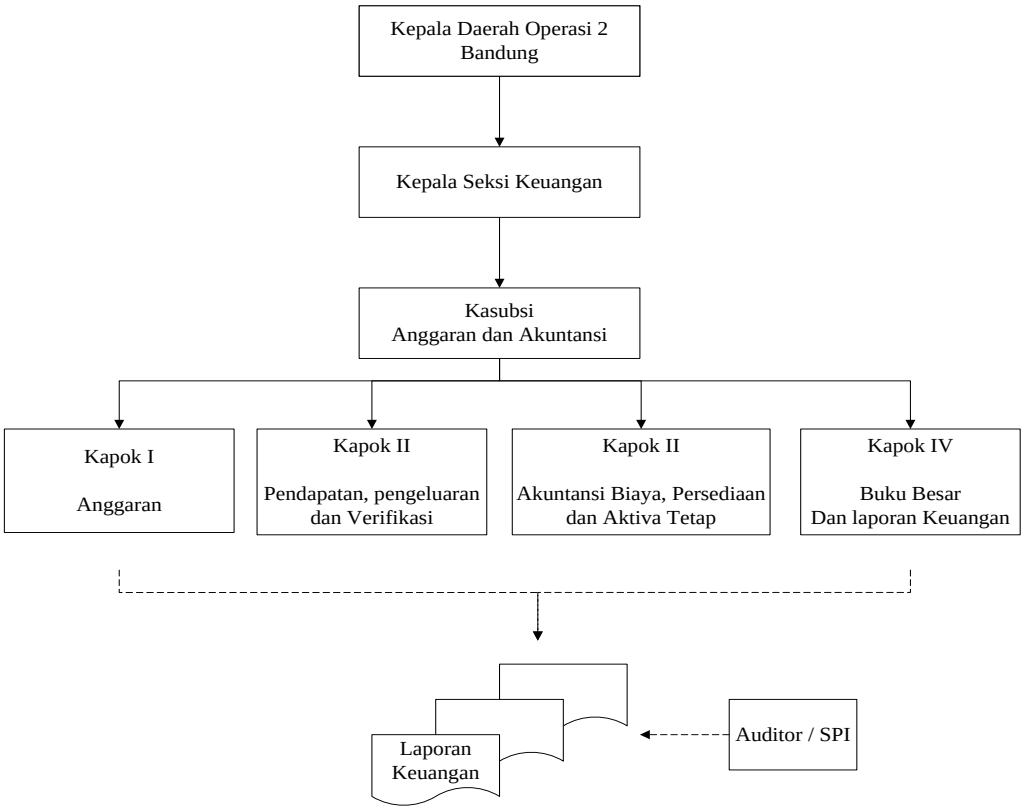
5) Pembuatan jurnal khusus.

6) Pelaksanaan rekonsiliasi hubungan pembukuan

7) Penyelidikan terhadap angka akun yang tidak wajar pada neraca lajur yang akan dituangkan dalam Laporan Keuangan Daerah Operasi 2 Bandung.

8) Pembuatan laporan berkala ikhtisar dukungan laporan keuangan.

Adapun struktur organisasi pada Sub Direktorat Akuntansi adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3

d. Sub Direktorat Sediaan

Sub Direktorat Sediaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Direktur Keuangan dalam menyusun rencana pengadaan, evaluasi pelaksanaan pengadaan barang, mengelola L/C dan tata cara administrasi impor atau anklaring, melaksanakan pengaturan penyimpanan dan pendistribusian barang, serta penghapusan sediaan, melaksanakan pembinaan sistem dan administrasi pergudangan barang sediaan, serta melaksanakan pembinaan dan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan tugas pergudangan dan angkutan barang perusahaan antar pulau.

Sub Direktorat Sediaan terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan Pengadaan.

2. Seksi Pengendalian dan Distribusi.
3. Seksi Informasi Sediaan.

2.4 Aktivitas Perusahaan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 8 KM Tahun 1991 tentang organisasi dan Tata Kerja PERUM Kereta Api Tingkat Pusat, aktivitas dari PT Kereta Api (Persero) itu sendiri mempunyai tugas pokok, menyelenggaraan perusahaan pelayanan jasa angkutan Kereta Api dalam memperlancar arus perpindahan orang atau barang secara masal untuk menunjang pembangunan nasional.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut PT Kereta Api mempunyai tugas pokok antara lain:

1. Penyediaan, pengoperasian, pendayagunaan, pemeliharaan, perbaikan, pengendalian, dan pengembangan sarana angkutan diatas jalan rel merupakan kelanjutan angkutan api.
2. Penyediaan, pemeliharaan, perbaikan dan pendayagunaan prasarana jalan rel, jembatan, terowongan, instalasi sinyal dan telekomunikasi, instalasi listrik umum dan listrik aliran atas, serta penyediaan dan pendayagunaan bangunan stasiun, pembangunan dipo yang menunjang bangunan kereta api.
3. Pengoperasian, pendayagunaan, pengendalian, pengusahaan stasiun untuk pemberangkatan, penurunan dan angkutan penumpang maupun barang serta jasa angkutan lain yang terkait.
4. Pengelolaan dan pendayagunaan serta pengembangan sumber daya manusia.
5. Pengelolaan dan pendayagunaan keuangan perusahaan.

6. Pengawasan intern.

Adapun perusahaan pelayanan jasa angkutan yang dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero) meliputi:

1. Pengangkutan penumpang.
2. Pengangkutan barang berupa pengangkutan bahan bakar, mesin, pupuk, dan lain-lain.
3. Selain poin 1 dan 2, PT.KAI (Persero) juga senantiasa membantu kegiatan perdagangan ekspor, impor, pengangkutan kepariwisataan dan lain-lain yang bertujuan untuk lebih meningkatkan pembangunan.

Untuk menunjang operasional PT.KAI (Persero) dibagi diatas 9 wilayah usaha di Jawa dan 4 divisi serta wilayah Sumatera yang terbagi menjadi berbagai Divisi Regional. Wilayah usaha Jawa terdiri dari 9 daerah operasi, yaitu:

1. Jakarta.
2. Bandung.
3. Cirebon.
4. Semarang.
5. Purwokerto.
6. Yogyakarta.
7. Madiun.
8. Surabaya.
9. Jember.

Divisi-divisi yang ada di PT. KAI (Persero), yaitu:

1. Divisi Sarana.

2. Divisi Usaha Pendukung.
3. Divisi Pelatihan.
4. Divisi Angkutan Perkotaan (Jabotabek).

Sedangkan wilayah usaha Sumatera terdiri dari 3 Daerah Operasi, yaitu:

1. Divisi I Sumatera Utara.
2. Divisi I Sumatera Barat.
3. Divisi I Sumatera Selatan.

Visi PT Kereta Api (Persero)

Mewujudkan transportasi yang bersifat masal untuk pertumbuhan ekonomi serta menunjang pembangunan sektor-sektor lain dan program pemerataannya.

Misi PT Kereta Api (Persero)

Perusahaan dapat tumbuh dan berkembang pesat, memiliki citra yang baik sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, memperoleh laba yang optimal, dan dapat memuaskan para stakeholder serta mensejahterakan seluruh karyawan.

Arti Logo Kereta Api

PT. Kereta Api (Persero)

1. Makna Karakter Logo atau Lambang PT Kereta Api.

   Gambar lambang menyiratkan sifat: tegas, pasti, tajam, gerak, horizontal, juga bolak balik. Dua garis lurus dengan ujung lengkung meruncing, dengan arah berlawanan, selain melambangkan arah bolak balik perjalanan kereta api, juga melambangkan interaksi pelayanan (memberi dan menerima).

2. Gaya Gambar

Lugas, langsung, tajam, teknis, selaras, dengan sifat teknis kereta api. Ujung garis tajam tapi melengkung untuk menyiratkan arah atau kecepatan (aerodinamis), tetapi cenderung tumpul agak melengkung, tidak terlampau tajam, agar memberi kesan aman (sesuatu bentuk yang terlampau runcing lebih member kesan ancaman, rasa sakit, dan agresitas; asosiatif kepada senjata tajam (duri dan semacamnya)).

3. Sifat Gambar

Sifat gambar lebih lugas, objektif, rasional karena bentuk geometrisnya yang dominan dan lebih bersifat maskulin. Kesan sangat modern, teknis, jelas, dan terlihat.